

## PELAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) MELALUI PENDIDIKAN INKLUSI

**Sukadari\***

Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia

Diterima : 22 Juni 2020

Disetujui : 1 Juli 2020

Dipublikasikan : Juli 2020

### Abstrak

Pendidikan inklusi adalah pendidikan atau sekolah yang menerima semua anak tanpa memandang potensi, kondisi fisik, mental, emosional, agama, gender maupun latar belakang ekonomi, tetapi merupakan sebuah sistem yang beradaptasi dengan kebutuhan anak baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus. Tujuan dari pendidikan inklusi adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi difabel atau Anak Berkebutuhan Khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi tentu pasti ada. Namun untuk mewujudkan Undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 tetap diupayakan seoptimal mungkin pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui pendidikan inklusi harus dilaksanakan dengan baik untuk mengangkat derajat dan martabat umat manusia tanpa kecuali.

**Kata kunci** : Anak berkebutuhan khusus, Pendidikan, Inklusi

### Abstract

Inclusive education is education or school that accepts all types of children without taking account their potential, physical states, mental, emotional, social condition, faith, gender or economic background as educational system that adapts to children's need both the normal ones and those with special needs. The purpose of inclusive education is to promote active participation from disabled or children with special needs in social life, national and state affairs. Obstacles in effort to realize inclusive education are bound to exist. Nevertheless, in attempt to fulfill the regulation of National Education System (Sisdiknas) No.20 year 2003 optimizing service for children with special needs (ABK) through inclusive education must be carried out with all possible means to elevate human dignity beyond and above all limitations.

**Keywords:** Special Needs Children, Education, Inclusive

### PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, guru di sekolah reguler perlu dibekali berbagai pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Diantaranya mengetahui siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus serta karakteristiknya. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan guru mampu melakukan identifikasi peserta didik di sekolah, maupun di masyarakat sekitar sekolah. Identifikasi anak berkebutuhan khusus diperlukan agar keberadaan mereka dapat

diketahui sedini mungkin. Selanjutnya, program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat diberikan. Pelayanan tersebut dapat berupa penanganan medis, terapi, dan pelayanan pendidikan dengan tujuan mengembangkan potensi mereka, mengidentifikasi (menemukan) anak berkebutuhan khusus, diperlukan pengetahuan tentang berbagai jenis dan tingkat kelainan anak, diantaranya adalah kelainan fisik, mental, intelektual, sosial dan emosi. Selain jenis kelainan tersebut terdapat anak yang

---

\*Corresponding Author

Program Pascasarjana Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia  
E-mail: sukadariupy@gmail.com

memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa atau sering disebut sebagai anak yang memiliki kecerdasan dan bakat luar biasa. Masing-masing memiliki ciri dan tanda-tanda khusus atau karakteristik yang dapat digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi anak dengan kebutuhan pendidikan khusus.

Untuk mendiagnosis yang secara menyeluruh dan mendalam, dibutuhkan tenaga profesional yang berwenang, seperti dokter anak, psikolog, ortopedagogik, psikiater, dan sebagainya. Jika pada sekolah tidak tersedia tenaga profesional dimaksud maka dengan alat identifikasi ini, guru, orang tua, dan orang terdekat lainnya dapat melakukan identifikasi, asal dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut dapat dijadikan acuan memberikan layanan Pendidikan Khusus secara inklusif.

## PEMBAHASAN

Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi

### 1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak.

Anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori yaitu: anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan. Misalnya, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri

akibat kerusuhan dan bencana alam, atau tidak bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar, anak yang mengalami kedwibahasaan (perbedaan bahasa di rumah dan di sekolah), anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena isolasi budaya dan karena kemiskinan dsb. Anak berkebutuhan khusus temporer, apabila tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatan belajarnya bisa menjadi permanen.

Anak berkebutuhan khusus memiliki perkembangan hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak, disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) faktor lingkungan; (2) faktor dalam diri anak sendiri; dan (3) kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak. Sesuai kebutuhan lapangan maka pada buku ini hanya dibahas secara singkat pada kelompok anak berkebutuhan khusus yang sifatnya permanen.

### 2. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi anak berkebutuhan khusus temporer dan permanen. Anak berkebutuhan khusus permanen meliputi; Anak dengan gangguan fisik, dikelompokkan lagi menjadi:

- a. Anak dengan gangguan penglihatan (tunanetra)
  - 1) Anak kurang awas (*low vision*)
  - 2) Anak buta (*blind*)
- b. Anak dengan gangguan pendengaran dan bicara (tunarungu/wicara)
  - 1) Anak kurang dengan (*hard of hearing*)
  - 2) Anak tuli (*deaf*)
- c. Anak dengan kelainan kecerdasan
  - 1) Anak dengan gangguan kecerdasan (intelektual) di bawah rata-rata (tunagrahita)

- a) Anak tunagrahita ringan (IQ 50 - 70)
- b) Anak tunagrahita sedang (IQ 25 - 49)
- c) Anak tunagrahita berat (IQ 25 - ke bawah)
- 2) Anak dengan kemampuan intelegensi di atas rata-rata
  - a) Gifted dan genius, yaitu anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata
  - b) Talented, yaitu anak yang memiliki keberbakatan khusus
- d. Anak dengan gangguan anggota gerak (tunadaksa)
  - 1) Anak layuh anggota gerak tubuh (polio)
  - 2) Anak dengan gangguan fungsi syarat otak (cerebral palsy)
- e. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi (tunalaras)
  - 1) Anak dengan gangguan perilaku
    - a) Anak dengan gangguan perilaku taraf ringan
    - b) Anak dengan gangguan perilaku taraf sedang
    - c) Anak dengan gangguan perilaku taraf berat
  - 2) Anak dengan gangguan emosi
    - a) Anak dengan gangguan emosi taraf ringan
    - b) Anak dengan gangguan emosi taraf sedang
    - c) Anak dengan gangguan emosi taraf berat
- f. Anak gangguan belajar spesifik
- g. Anak lamban belajar (*slow learner*)
- h. Anak Autis
- i. Anak ADHD

Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Proses Pendidikan Inklusi

Marendra (2003) berpendapat, setelah dilakukan identifikasi dapat diketahui kondisi seseorang anak, apakah pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan atau tidak. Bila mengalami kelainan, dapat diketahui pula apakah anak tergolong; tunanetra,

tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, lamban belajar, mengalami kesulitan belajar spesifik, autis, berbakat, ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorders*), gangguan perhatian dan hiperaktif.

Kegiatan identifikasi sifatnya masih sederhana dan tujuannya lebih menekankan pada menemukan (secara kasar) apakah seorang anak tergolong anak berkebutuhan khusus atau bukan. Menurut Scot Danforth (2006), dalam pelaksanaan identifikasi biasanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat (sering berhubungan/ bergaul) dengan anak, seperti orang tuanya, pengaruh, guru dan pihak lain yang terkait dengannya. Setelah dilakukan identifikasi langkah selanjutnya yang sering disebut asesmen, dan bila diperlukan dapat dilakukan oleh tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, neurolog, ortopedagogik, terapis, dan tenaga ahli lainnya.

Konsep Dasar Pendidikan Inklusi

Inklusi dari kata bahasa Inggris, yaitu *inclusion*, yang mendiskripsikan sesuatu yang positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh (Smith, 2006)

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak yang sebayanya di sekolah reguler dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif (Moelyono, 2008)

Dalam Toolkit LIRP atau Lingkungan Inklusi Ramah Pembelajaran, UNESCO (2007), memberikan batasan yang lebih luas, inklusi berarti mengikutsertakan anak berkelainan seperti anak yang memiliki kesulitan melihat, mendengar, tidak dapat berjalan, lamban dalam belajar, dan sebagainya.

Inklusi dapat pula berarti bahwa tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan, yaitu tujuan pendidikan bagi siswa yang menyeluruh. Inklusi dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri (visi-misi) sekolah. Fuch dan Fuchs dalam Smith (2006). Sebagian banyak menggunakan istilah inklusi sebagai banner untuk menyerukan “*full inclusion*” atau “*uncompromising inclusion*”, yang berarti penghapusan pendidikan khusus.

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertkan setiap anggota masyarakat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus adalah mereka yang mempunyai kebutuhan permanen dan atau sementara untuk memperoleh layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Kebutuhan ini dapat muncul karena kelainan bawaan atau diperoleh setelah lahir, kondisi sosial, ekonomi dan atau politik (Hidayat, 2003)

Pendidikan inklusi adalah proses pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus dalam sekolah umum (*regular*), dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan kesempatan bagi persiapan mereka hidup di dalam masyarakat. Penekanan pendidikan inklusi adalah pengkajian ulang dan perubahan sistem pendidikan agar menyesuaikan diri pada siswa” (Nasichin, 2003).

Dalam pendidikan inklusif, semua anak belajar dan memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran dengan anak-anak regular. Apabila ada kegagalan dalam belajar, maka kegagalan itu adalah kegagalan sistem. Pendidikan inklusif juga dapat menangani semua jenis individu, bukan hanya anak yang mengalami kelainan. Dengan demikian, guru dan sekolah bertanggung jawab terhadap pembelajaran anak, dan pembelajaran berfokus pada kurikulum yang fleksibel.

Soebagyo Brotosedjati (2003), memberikan batasan tentang pendidikan inklusi yaitu suatu model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak berkelainan (berkebutuhan khusus) yang diselenggarakan bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga yang bersangkutan.

Definisi sejenis dibuat oleh Staubak Peck masih dalam Sunardi (2003), mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak luar biasa tingkat ringan, sedang dan secara penuh di kelas biasa. Vaughn, Bos dan Schuman dalam Sunardi (2003), pada praktiknya istilah inklusi sering dipakai bergantian dengan istilah *mainstreaming* yang secara teori diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan individunya.

Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Salah satu kelompok yang paling tereksklusi dalam memperoleh pendidikan adalah siswa penyandang cacat. Tapi ini bukanlah kelompok yang homogen. Sekolah dan layanan pendidikan lainnya harus fleksibel dan akomodatif untuk memenuhi keberagaman kebutuhan siswa. Mereka juga diharapkan dapat mencari anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan.

Pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan dimana anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah umum yang ada di lingkungan mereka dan sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak

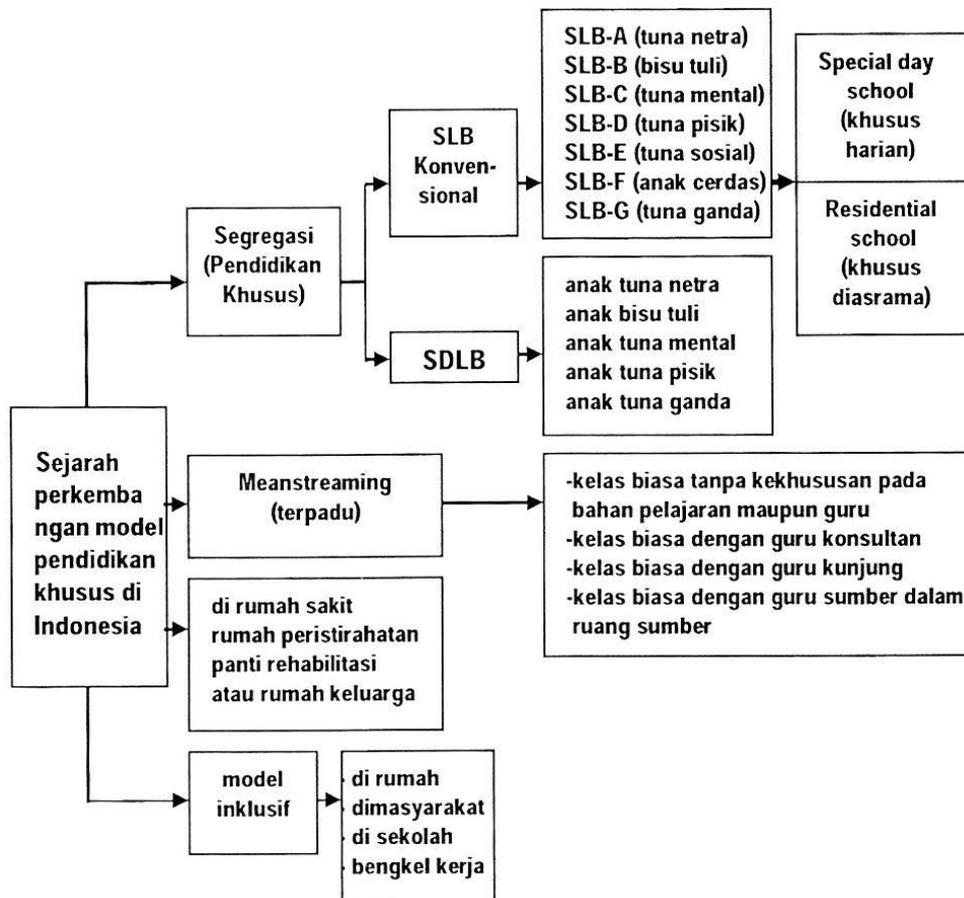
(Konferensi Tingkat Menteri Pendidikan Negara-negara Afrika - MINEDAF VIII).

Pendekatan inklusi merupakan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak secara individual dalam kebersamaan klasikal (Gunarhadi, 2001). Dalam pendekatan ini akan tidak dilihat dari segi ketidakmampuan dan tidak pula dari segi kecacatannya. Seorang anak berkelainan mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang berbeda dengan anak-anak lainnya.

Sekolah inklusif menerima semua anak tanpa memandang kemampuan, kecacatan, gender, latar belakang sosial, ekonomi, etnik, agama maupun bahasanya. Sekolah inklusi merupakan sebuah sistem yang beradaptasi dengan kebutuhan setiap anak. Anak belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing untuk

mencapai perkembangan akademik, sosial, emosi, dan fisiknya secara optimal. Anak penyandang kelainan dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya serta para orang tua dan gurunya mempunyai akses ke sebuah sistem pendukung berbasis sekolah atau masyarakat maupun sistem pendukung eksternal (tanpa biaya). Sistem tersebut dirancang untuk secara efektif merespon kebutuhan yang mungkin dihadapi anak-anak tersebut.

Pendidikan inklusif atau pembelajaran inklusif mengacu pada inklusi dan pengajaran semua anak dalam lingkungan belajar formal atau non-formal tanpa mempertimbangkan gender, intelektual, emosi, linguistik, budaya, agama atau karakteristik lainnya (Toolkit LIRP, 2007).



Gambar 1. Model Pendidikan bagi Penyandang Cacat di Indonesia  
Sumber: Tangyong, (1986) (modifikasi Haryanto, 2017)

Faktor Penentu Keberhasilan Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi bagi penyandang cacat, tidak cukup dengan

memahami konsepnya saja. Sebuah rencana juga harus realistis dan tepat untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif dapat dipraktikkan dalam berbagai budaya dan konteks. Pengalaman pendidikan inklusif yang sukses menunjukkan ada tiga faktor penentu utama yang perlu diperhatikan agar implementasi pendidikan inklusi bertahan lama.

- a) Adanya kerangka yang kuat  
Pendidikan inklusi perlu didukung oleh kerangka nilai-nilai, keyakinan, prinsip-prinsip, dan indikator keberhasilan. Hal ini akan berkembang seiring dengan implementasinya dan tidak harus “disempurnakan” sebelumnya. Namun, jika pihak yang terlibat misalnya mempunyai konflik nilai-nilai dan jika konflik tersebut tidak diselesaikan, pendidikan inklusif akan mudah hancur.
- b) Implementasi berdasarkan budaya dan konteks lokal  
Pendidikan inklusi bukan merupakan suatu cetak biru, satu kesalahan utama adalah asumsi bahwa solusi yang diekspor dari suatu budaya/konteks dapat mengatasi permasalahan dalam budaya/konteks lain yang sama sekali berbeda. Lagi-lagi, berbagai pengalaman menunjukkan bahwa solusi harus dikembangkan secara lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal; jika tidak, solusi tersebut tidak akan bertahan lama
- c) Partisipasi yang berkesinambungan dan refleksi diri  
Pendidikan inklusi tidak akan berhasil jika hanya sebagai struktur yang mati. Pendidikan inklusi merupakan proses yang dinamis. Agar pendidikan inklusi terus hidup, diperlukan adanya monitoring partisipatori yang berkesinambungan, yang melibatkan semua stakeholder dalam refleksi diri yang kritis. Satu prinsip inti dari pendidikan adalah refleksi diri yang kritis. Satu prinsip inti dari pendidikan inklusif adalah harus tanggap terhadap keberagaman secara fleksibel, yang

senantiasa berubah dan tidak dapat diprediksi. Jadi, pendidikan inklusif harus tetap hidup dan mengalir. Secara bersama-sama, ketiga faktor penentu utama tersebut membentuk organisme hidup kuat, yang dapat beradaptasi dan tumbuh dalam budaya dan konteks lokal.

#### Model Pendidikan Inklusi dalam Kondisi Pedesaan

Sebagaimana terjadi di Distrik Doventza Mali, salah satu daerah pedesaan termiskin di dunia, 90% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Kurang lebih 8% anak yang bersekolah, 87% anak usia tujuh tahun bekerja sekitar 6 jam per hari. Sue Stubbs (2002) berpendapat, pada sisi lain hanya 6% dari desa-desa memiliki sekolah dan guru-gurunya tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dan beban kerjanya sangat tinggi.

Dalam konteks ini, program rintisan pendidikan dikembangkan, yang di dalamnya juga terdapat inklusi sebagai komponen inti, yakni (1) program rintisan dimulai dengan studi kelayakan yang seksama dengan melibatkan semua *stakeholder* masyarakat untuk menampung perspektifnya tentang pendidikan dan persekolahan; (2) masyarakat tersebut memprioritaskan pendidikan dan komite sekolah dibentuk yang mencakup seorang wanita yang bertanggungjawab untuk model pendidikan inklusi untuk penyandang kelainan dapat dilaksanakan melalui pelayanan di sekolah, rumah, masyarakat, dan bengkel kerja. Berkaitan dengan pengembangan uji coba model pendidikan keterampilan kerja bagi penyandang kelainan melalui pelayanan keliling berbasis partisipasi masyarakat, peneliti mengadopsi pengembangan model inklusi dari tiga aspek, yaitu pelayanan keliling pendidikan di rumah, masyarakat, dan bengkel kerja.

#### Tantangan Model Pendidikan Inklusi

Tantangan yang berdampak khusus pada penyandang kelainan adalah (1) tantangan sosial emosional; mengem-

bangkan interaksi dan komunikasi yang bermakna yang merupakan dasar bagi semua hubungan sosial dan pembelajaran, mengembangkan hubungan pertemanan yang tulus; mengatasi kesepian, jauh dari rasa cinta dan mendapatkan respon atau tanggapan, mengembangkan harga diri yang baik; (2) tantangan yang berkaitan dengan pembelajaran dan perkembangan keterampilan; mengembangkan keterampilan bahasa fungsional; memperoleh penguasaan dan kompetensi melalui hubungan teman sebaya; (3) tantangan yang berkaitan dengan penyiapan dan penataran para profesional yang bekerja dalam setting inklusif, memperoleh pengalaman yang cukup, memperoleh pengetahuan baru.

Kesepakatan internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi disetiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan, dalam hal ini para guru.

Dilema yang Dihadapi dalam Pendidikan Inklusi

1. Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel)
2. Masih dipahaminya pendidikan inklusi secara dangkal, yaitu semata-mata masukkan anak disabled *children* ke sekolah reguler, tanpa upaya untuk mengakomodasi kebutuhan khususnya. Kondisi ini dapat menjadikan anak tetap terinklusi dari lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi, ditolak,

tidak nyaman, sedih, marah, dan sebagainya. Pada hal makna inklusi adalah ketika lingkungan kelas atau sekolah mampu memberikan rasa senang, menerima, ramah, bersahabat, peduli, mencintai, menghargai, serta hidup dan belajar dalam kebersamaan.

3. Munculnya label-label khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap eksklusifisme, seperti Sekolah Unggulan, Sekolah Berstandar Internasional (SBI), Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI), sekolah favorit, sekolah percontohan, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang berbasis agama. Kondisi ini tentu dapat berdampak kepada sekolah inklusi sebagai sekolah dua (*second class*), karena menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sama dengan *special school* (Imam Subkhan, 2009)
4. Masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusi secara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumber daya, maupun uji coba metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan program eksperimental (Cak Fu, 2005).

Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik Sekolah Inklusi

Masih banyak anak berkebutuhan khusus (96,3%) yang berada di Indonesia belum memperoleh hak mendapatkan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh (1) kondisi ekonomi orang tua yang kurang menunjang; (2) jarak antara rumah dan Sekolah Luar Biasa (SLB) cukup jauh; dan (3) sekolah umum (SD, SMP) tidak mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak-anak normal, oleh karena itu perlu diupayakan model layanan pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak normal di sekolah umum.

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah inklusi, yang peserta didiknya terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus, diperlukan guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus (GPK) yang bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melayani anak berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki berkembang secara optimal. Sehubungan dengan minimnya Guru Pembimbing Khusus yang memiliki kompetensi memadai, maka perlu diupayakan pengakatan dan pembinaan secara profesional sesuai kebutuhan sekolah.

#### Kedudukan Guru

Guru berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan pada usia dini pada jalur pendidikan formal yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan untuk masing-masing guru secara rinci seperti berikut.

- a. Guru kelas berkedudukan di sekolah dasar yang ditetapkan berdasarkan kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah.
- b. Guru mata pelajaran/ bidang studi adalah guru yang mengajar mata

pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan di sekolah

- c. Guru pendidikan khusus berkedudukan sebagai guru pendamping khusus. Secara administrasi status kepegawaian, ada beberapa alternatif yang memungkinkan.

#### 1) Alternatif 1

Guru pendidikan khusus yaitu guru tetap pada satuan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (SLB) sebagai basis kedudukannya dan atasan langsung yang bertanggungjawab terhadap pembina guru pendidikan khusus adalah kepala SLB tersebut.

Sekolah umum tempat anak berkebutuhan khusus belajar, diupayakan yang jaraknya berdekatan dengan SLB atau secara akomodasi dari transportasi terjangkau, sehingga guru pendidikan khusus dari sekolah basis dapat melayani beberapa sekolah umum yang ada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi kepadanya. Secara organisatoris dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Organisasi Pelayanan ABK

Keterangan :

--- = garis koordinasi

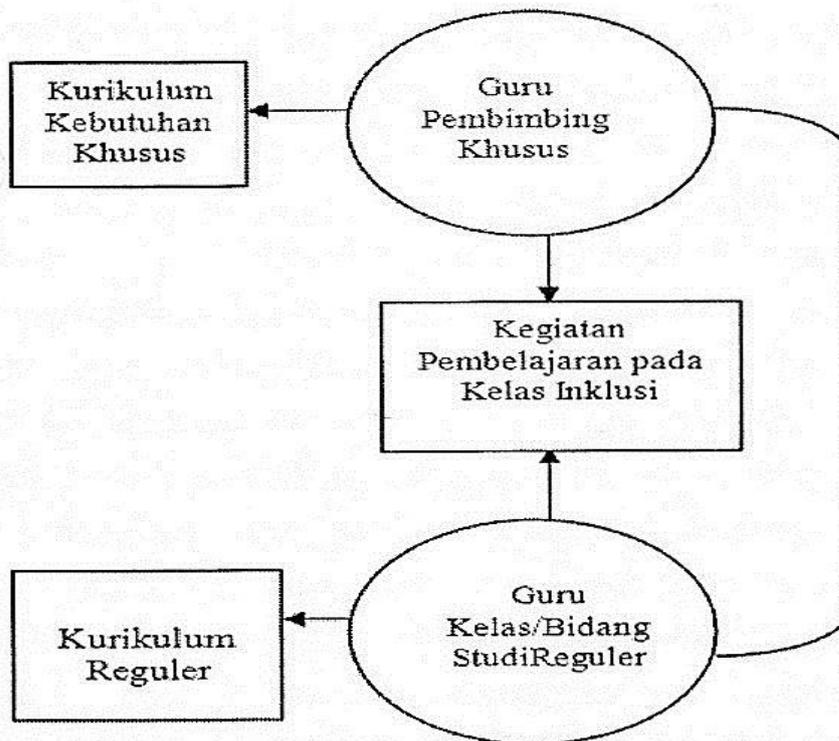
→ = garis komando/ pembinaan

GPK = Guru pendidikan khusus  
 LSM = Lembaga swadaya masyarakat

2) Alternatif 2

Guru pendidikan khusus yaitu guru-guru yang ada di klinik-klinik pendidikan atau pusat-pusat pengembangan anak. Guru-guru ini lebih banyak berperan sebagai konsultasi pendidikan. Anak-anak yang sering ditangani di klinik-klinik pendidikan ini biasanya yang mengalami gangguan perilaku, perhatian, komunikasi misalnya anak-anak autisme dan berkesulitan belajar. Klinik pendidikan atau

pusat-pusat pengembangan anak, berkolaborasi dengan sekolah umum untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah tersebut. Guru pendidikan khusus bersama-sama dengan guru kelas dan orang tua anak bersama-sama menyusun program pendidikan. Secara diagramatis manajemen kurikulum pada sekolah inklusif dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Sistem Manajemen Sekolah Inklusif

### KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka dapat ditarik kesimpulan bahwa;

1. Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui pendidikan inklusi adalah sebuah keniscayaan karena amanat Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003;

2. Kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan pendidikan inklusi masih banyak kendala, para tokoh masyarakat, orang tua ABK dan pemerintah harus bersinergi bahu membahu untuk mewujudkan pendidikan inklusi dengan baik sehingga mampu mengikis diskriminatif dan juga mengangkat derajat harkat dan martabat ABK

sebagai kodrat manusia pada umumnya.

3. Tenaga pendidik (Guru) baik yang umum maupun yang pendamping khusus harus benar-benar memahami karakter ABK sehingga mampu melayani sesuai dengan kondisi maupun potensinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, Z. 2005. *Memahami pendidikan inklusi dan anak berkebutuhan khusus*. Makalah tidak diterbitkan. Bandung: Jurusan PLB FIP UPI.
- Ashman, A. & Elkins, J. 1994. *Educating Children with Special Needs*. New York: Prentice Hall.
- Abdul Haris. 2003. "Meningkatkan Kemampuan Sosialisasi Siswa Berkebutuhan Khusus Melalui Aplikasi Pembelajaran Berbasis Inklusif di Sekolah Reguler". *Jurnal Rehabilitasi Remidiasi*, 13, 102-10.
- Endang Rochyadi. 2001. *Penerapan Program Pembelajaran Individual bagi Anak Tunagrahita*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Evans, I.M., Salisbury, C.L., Palombaro, M.M., Berryman, J., & Hollowood, T.M. 1992. *Peer Interactions and Social Acceptance of Elementary-Age Children with Severe Disabilities in an Inclusive School*. *Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps*, 17, 205-212.
- Hameed, Abdul. 2005. *Pendidikan Inklusif Satu-Satunya Cara untuk Memberantas Ketidaksetaraan dan Ketidak Adilan*. ENet Asia Newsletter.
- Haryanto. 1997. *Evaluasi Pelaksanaan Model Pendidikan Luar Biasa (PLB) di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Playen Gunungkidul dan Pengasih Kulonprogo*, Yogyakarta: Tesis.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No. 70 Tahun 2009)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa Tengah. 2006. *Guru Ideal Dalam Implementasi Pendidikan Inklusi*. Makalah. Disajikan Dalam Rangka Dies Natalis UNS ke XXXIX, di Universitas Sebelas Maret.
- Loreman, T, Deppeler, J , and Harvey, D. 2010. *Inclusive Education*, London and New York: Routledge, Taylor and Francis group.
- Mulyono Abdulrahman. 2003. *Landasan Pendidikan Inklusif dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan LPTK*. Makalah disajikan dalam pelatihan penulisan buku ajar Bagi Dosen jurusan PLB yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti. Yogyakarta, 26 Agustus 2002.
- Nasichin. April 2003. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pendidikan Inklusif*. Makalah. Disampaikan Pada Acara Seminar Nasional tentang Model Pendidikan Inklusif di Indonesia dan Implementasinya di Jawa Tengah, di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Permendiknas Nomor 70. 2009. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pokja Pendidikan Inklusif Kota Metro. 2015. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kota Metro*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 7.
- Soebagyo Brotosedjati. 2003. *Rintisan Pendidikan Inklusi di Jawa Tengah*, Makalah. Disampaikan Pada Acara Seminar Nasional tentang Model Pendidikan Inklusif di Indonesia dan Implementasinya di Jawa Tengah, Surakarta, di Universitas Sebelas Maret.
- Sukadari. 2020. *Metode Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta. Penerbit: Kanwa Publisier.
- Sunardi. 1994. *Mainstreaming Salah Satu Alternatif Pendidikan Semua Anak Cacat*. Makalah pada Seminar Nasional PLB di Indonesia. Bandung: HISPELBI.
- Topping, Keith and Sheelagh Maloney. 2005. *The Routledge Falmer Reader in Inclusive Education*, New York: Routledge Falmer.
- Tangyong. A.F. ed. 1986. *Pelayanan Pendidikan Luar Biasa, Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita*.
- UNESCO. 1994. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris: Author
- UNESCO. 1994. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris: UNESCO.
- Unesco, Toolkit. 2007. *Merangkul Perbedaan: Perangkat Untuk Menciptakan Lingkungan Inklusif, Ramah Pembelajaran*. Unesco.
- Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997. *Tentang penyandang cacat*. Jakarta: Media Elektronika Sekretariat Negara.
- Warnock, H.M. 1978. *Special Educational Needs: Report of the committee of Enquiry into the Education of Handicapped Young People*. London: Her Majesty's Stationary Office.